

Pengaruh Pengetahuan dan Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Penerapan PSAP No 5 Dalam Penyajian Beban Persediaan di Laporan Keuangan

Djuwita Permatasari ^{1*}

^{1*} Sekolah Pascasarjana Universitas Widayatama, Jl. Cikutra No. 204 A, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Corresponding Email: djuwita87@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 15 September 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Permatasari, D. (2025). Pengaruh Pengetahuan dan Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Penerapan PSAP No 5 Dalam Penyajian Beban Persediaan di Laporan Keuangan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5742-5754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5576>.

Abstrak

Audit BPK atas Laporan Keuangan 2015 menemukan ketidaksesuaian penyajian persediaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga BPS memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan ini mencerminkan kendala penerapan PSAP No. 5 terkait persediaan. Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan dan pengawasan terhadap penerapan PSAP No. 5 pada Satker BPS Jawa Barat, menggunakan metode eksplanatori-kuantitatif dengan regresi berganda dan kuesioner daring. Hasilnya, pengetahuan dan pengawasan berpengaruh simultan, namun secara parsial hanya pengetahuan yang signifikan, sedangkan pengawasan atasan langsung tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Persediaan; PSAP No.5; Laporan Keuangan.

Abstract

The Audit Board of the Republic of Indonesia's (BPK) review of the 2015 Financial Statements revealed numerous inconsistencies in inventory reporting against government accounting standards, resulting in a Fair with Exceptions (WDP) opinion for BPS. This highlights issues in implementing PSAP No. 5 on inventory, likely influenced by multiple factors. This study examines how awareness and supervisory oversight affect the application of PSAP No. 5 in presenting inventory expenses in financial reports. The research covers all BPS work units in West Java, employing an explanatory, quantitative design with multiple regression analysis. Data were collected through online questionnaires during the pandemic. Findings show that awareness and supervision jointly influence PSAP No. 5 implementation, but individually, only awareness has a significant effect, while direct supervision does not.

Keyword: Inventory; PSAP No. 5; Financial Statements.

RESEARCH ARTICLE

1. Pendahuluan

BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian di bawah Presiden yang dibentuk dari Biro Pusat Statistik melalui UU No. 6/1960 dan UU No. 7/1960. Keduanya kemudian diganti oleh UU No. 16/1997 yang sekaligus menetapkan perubahan nama menjadi BPS. Struktur organisasinya terdiri atas BPS Provinsi di bawah Kepala BPS dan BPS Kabupaten/Kota di bawah Kepala BPS Provinsi. BPS Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kota Bandung, merupakan instansi vertikal yang membawahi BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya. Seperti entitas pemerintah lainnya, BPS Provinsi Jawa Barat wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta menerapkan pengendalian intern yang memadai agar terbebas dari permasalahan material karena kecurangan atau kesalahan. Salah satu akun yang material dalam neraca adalah persediaan, yang nilainya berpengaruh signifikan terhadap opini auditor. Persediaan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas instansi, dan meskipun tidak langsung terkait efisiensi pengelolaan keuangan negara, kesalahan penyajian nilai atau beban persediaan dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan (Din et al., 2020; Mursyidi, 2013; Nawawi, 1994). Persediaan menurut SAP adalah aset lancar untuk operasional atau pelayanan publik. Ketentuan ini dipertegas dalam PMK No. 225/PMK.05/2019, yang menekankan bahwa klasifikasi persediaan ditentukan oleh niat awal saat perencanaan dan penyusunan RKAKL, bukan bentuk fisiknya. Barang terencana habis dalam satu kegiatan tidak dikategorikan sebagai persediaan maupun dibebankan pada Belanja Barang Persediaan. Kementerian Keuangan mengelola teknis klasifikasi persediaan lewat Surat Direktur APK No. S-6478/PB.6.2015, yang menetapkan barang hanya dianggap persediaan jika pengadaannya bersifat kontinu, bukan satu kali.

Untuk kegiatan berkelanjutan, penganggaran dilakukan dalam tiga kelompok MAK: belanja barang persediaan konsumsi (MAK 521811), pemeliharaan gedung dan bangunan (MAK 523121), serta pemeliharaan peralatan dan mesin (MAK 523123). Implementasi kebijakan akuntansi persediaan bervariasi di tiap satuan kerja, termasuk BPS Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman personel sejak tahap penganggaran hingga pelaporan persediaan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (Mufidah, 2017). Awal identifikasi mengungkap bahwa unit kerja di BPS Jawa Barat hanya mencatat persediaan dan beban persediaan pada akun belanja konsumsi (521811), sementara kelompok belanja lain yang menghasilkan persediaan tidak tercatat sebagai persediaan maupun beban di laporan operasional. Kesalahan penganggaran ini menyebabkan salah saji yang berpotensi material dan memengaruhi opini audit BPK. Setelah bertahun-tahun mendapat opini Wajar Diluar laporan keuangan BPS tahun 2015 menjadi Wajar Dengan Pengecualian karena temuan BPK senilai Rp203,43 miliar, melampaui batas toleransi 3% dari anggaran Rp5,04 triliun, dengan 53,51% temuan terkait pengelolaan dan pencatatan persediaan yang masih lemah (Badan Pusat Statistik, 2016). Persediaan bernilai material dalam laporan keuangan. Data persediaan dan bebannya di BPS Jawa Barat TA 2020 tercantum berikut.

Tabel 1 . Penyajian Persediaan dan beban Persediaan dalam LK BPS Provinsi Jawa Barat TA 2020

No	Akun	Jenis Laporan	Nilai dalam LK (Rp)	Nilai Total Aset/Beban (Rp)	Persentase (%)
1	Persediaan	Neraca	6.639.339.340	7.119.463.491	93 %
2	Beban Persediaan	Laporan Operasional	10.471.160.846	316.878.498.807	3%

Pengelolaan persediaan memerlukan pengendalian intern yang efektif untuk mencegah penyimpangan dan menjamin kewajaran nilai dalam laporan keuangan, sesuai asersi yang diuji auditor (PSA No. 07/326). Meski penelitian sebelumnya fokus pada SAP akrual, BPK menemukan kelemahan penyajian beban persediaan di BPS, mendorong penelitian terhadap peran personel yang menyusun laporan konsolidasi dari satuan kerja Kabupaten/Kota (Sukmawati et al., 2017).

RESEARCH ARTICLE

Penelitian ini mengacu pada Teori Implementasi Kebijakan Edwards III (1980) yang menyebutkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi penentu implementasi (Widodo, 2017). Fokusnya pada pengaruh pengetahuan operator persediaan dipengaruhi pendidikan formal (Dewi & Wawan, 2010) dan pengawasan atasan langsung, yang berperan memastikan kepatuhan prosedur serta mencegah salah saji beban persediaan (Wehrich, 2009). Beberapa penelitian menegaskan pentingnya pengetahuan dalam pengelolaan persediaan. Din et al. (2020) pengelola persediaan kurang memahami dasar pengelolaan karena mayoritas bukan lulusan akuntansi (Kasmir, 2019). Sejalan dengan Sukmawati et al. (2017), ketidak optimalan pengelola menjalankan tugas dan kurang paham hak serta kewajibannya. Rizka Putri Rifai (2016) merekomendasikan penambahan SDM dengan spesialisasi akuntansi persediaan untuk meningkatkan pencatatan sesuai standar yang berlaku.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengetahuan

Kusumadmo (2013) informasi dan data yang dilengkapi keterampilan, kompetensi, gagasan, intuisi, komitmen, dan motivasi, berada dalam gagasan, keputusan, bakat, hubungan, perspektif, konsep, dan di-encode pada proses, dokumen, produk, sarana, serta sistem organisasi, mencakup aksi, inovasi, kemampuan, hubungan, dan aliansi khusus. Davenport dan Prusak (2000) menyatakan pengetahuan merupakan kombinasi pengalaman terpola, nilai, data kontekstual, dan kerangka kerja dari wawasan ahli yang diimplementasikan dalam diri individu maupun organisasi untuk kinerja, problem solving, pengambilan keputusan, serta pembelajaran (James, 2004 mengutip Probst et al., 2000). Kamus Bahasa Indonesia (2003) mendefinisikan pengetahuan sebagai sesuatu yang dimengerti terkait proses belajar memperoleh pengaruh dari motivasi, sarana data, dan kondisi sosial budaya, serta pendidikan formal (Dewi dan Wawan, 2010), minimnya pendidikan berbeda dengan wawasan. Pengetahuan pegawai penting untuk mendukung penyelesaian tugas agar hasil maksimal dan meminimalisir kesalahan, diperoleh dari pengalaman dan membaca, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang berbentuk analisis (Nurdin, 2004). Menurut Notoadmojo (2007), pengetahuan mencakup tingkatan tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dimensi pengetahuan meliputi pendidikan, pengalaman, dan minat dengan indikator masing-masing (Yuniarsih, 2013).

2.2 Pengawasan

Pengawasan dalam organisasi, baik pemerintah maupun swasta, bertujuan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan tujuan, serta mampu merespons cepat bila terjadi kendala. Menurut Hani Handoko (2003:379), pengawasan merupakan proses menjamin ketercapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sementara Saydam (2000:584) menyebutnya sebagai pengendalian pelaksanaan pekerjaan agar sesuai output yang diinginkan, dan Wehrich (2009) mendefinisikannya sebagai pengukuran serta perbaikan pekerjaan bawahan agar rencana organisasi tercapai. Fathurrochman (2002) membagi pengawasan menjadi internal termasuk pengawasan melekat (waskat) dan fungsional serta eksternal, sejalan dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 yang juga membedakan pengawasan atasan langsung dan fungsional. Sukarna (2011) mengemukakan tujuan pengawasan meliputi memastikan kelancaran pekerjaan, memperbaiki dan mencegah kesalahan, memastikan penggunaan dana sesuai anggaran, menilai kesesuaian hasil dengan rencana, dan memastikan pelaksanaan sesuai prosedur. Robbins & Mary Coulter (2005) menyebut dimensi pengawasan meliputi penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan perbaikan, sedangkan Handoko (2013) menegaskan indikator pengawasan harus akurat, tepat waktu, obyektif, fokus pada titik strategis, realistis secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan alur kerja, fleksibel, bersifat operasional, serta diterima anggota organisasi.

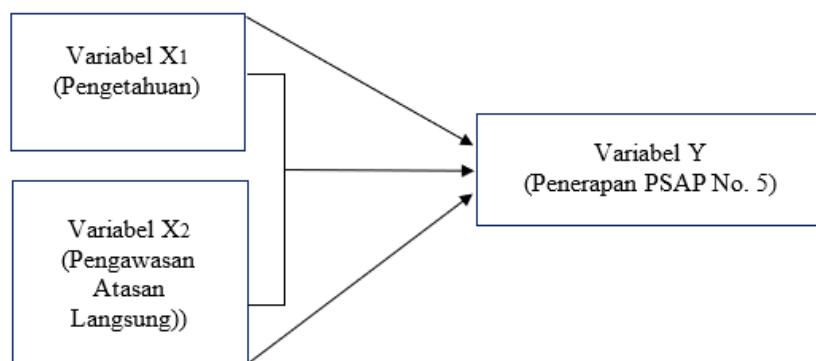
RESEARCH ARTICLE

2.3 Penerapan PSAP No.5 terkait Persediaan

Menurut PSAP Nomor 05, persediaan meliputi barang/perlengkapan habis pakai (alat tulis), tak habis pakai (komponen peralatan/pipa), bekas pakai, barang konsumsi, amunisi, bahan pemeliharaan, suku cadang, persediaan strategis/cadangan (energi, pangan), pita cukai/leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan, serta hewan/tanaman untuk dijual/diserahkan, termasuk barang hasil produksi sendiri dan setengah jadi; persediaan rusak/usang diungkapkan dalam CaLK (Koori et al., 2017). Diakui pada potensi manfaat ekonomi mendatang, nilainya terukur, penerimaan hak yang berpindah, serta akhir periode dicatat berdasarkan inventarisasi fisik; beban diakui saat digunakan, diserahkan, atau berkurang karena sebab lain. Pengukuran berdasarkan biaya perolehan (harga beli, angkut, penanganan dikurangi potongan), biaya standar (langsung+overhead), atau nilai wajar (donasi/rampasan/hewan/tanaman). Pencatatan menggunakan metode fisik/periodik dengan prinsip perpetual di administrasi gudang, dan secara periodik nilai dicatat pada akun "Persediaan" (debit) dan "Cadangan Persediaan" (kredit). Persediaan dilaporkan di neraca sebagai aset lancar dan diungkapkan dalam CaLK mencakup kebijakan pengukuran, jenis barang, kondisi, dan perolehan khusus. Berdasarkan S-4678/PB.6/2015, S-9070/PB/2014, dan Kep-311/PB/2014, pemisahan akun belanja didasarkan pada niat awal dan keberlanjutan pengadaan; barang persediaan tidak terbatas pada satu output layanan, melainkan setiap barang yang memenuhi kriteria tersebut.

3. Metode Penelitian

Menurut Umar (2005:303), objek penelitian mencakup apa/siapa yang diteliti, lokasi, waktu, dan hal relevan lainnya. Penelitian mengkaji pengetahuan, pengawasan atasan langsung, serta pelaksanaan PSAP No. 5 di BPS se-Provinsi Jawa Barat, dengan subjek operator persediaan, Kasubbag Umum, dan Arsiparis Muda pada 26 Satker Kabupaten/Kota dan Satker Provinsi, dilaksanakan Maret 2021 saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2020. Metode eksplanasi digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2015a) dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2015b), desain penelitian mengikuti Nasution (2003:23). Variabel: X1 (Pengetahuan), X2 (Pengawasan Atasan Langsung), dan Y (Penerapan PSAP No. 5). Populasi adalah seluruh Satker BPS di Jawa Barat (Sugiyono, 2015:80), sampel 54 responden (dua per Satker) dengan purposive sampling (Sugiyono, 2015a). Kuesioner tertutup skala Likert (Sugiyono, 2015a) diadaptasi dari Chairina (2013) dan Nopriansyah Putra (2016), disebar via Google Form karena pandemi. Analisis regresi berganda digunakan (Sugiyono, 2015a) guna menganalisa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$. Uji asumsi klasik meliputi normalitas (Ghozali, 2018; Priyastama, 2008), multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji t mengukur pengaruh parsial, uji F pengaruh simultan, koefisien determinasi R^2 (Kuncoro, 2013:246) dan korelasi (Sutomo, 2017) menunjukkan kekuatan hubungan antarvariabel.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

RESEARCH ARTICLE

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Analisis regresi berganda untuk mengolah dan menganalisis data sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Statistik deskriptif juga diterapkan untuk menggambarkan karakteristik responden, meliputi jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan latar belakang pendidikan berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	29	53,70 %
	- Perempuan	25	46,30 %
2.	Jenjang Pendidikan		
	- SLTA	6	11,11 %
	- Diploma	3	5,56 %
	- Sarjana (S1)	34	62,96 %
	- Magister (S2)	11	20,37 %
3.	Latar Belakang Pendidikan		
	- Akuntansi	4	7,40 %
	- Diklat / Pelatihan Keuangan	3	5,56 %
	- Lainnya	47	87,04 %

4.1.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Data tanggapan responden terhadap kuesioner menggambarkan persepsi terhadap variabel yang diteliti. Untuk mempermudah interpretasi, skor diklasifikasikan berdasarkan rentang kuartil. Cooper & Schindler (2006), data asimetris memakai rentang kuartil sebagai ukuran pemusatan. Dengan skala 1–5 (Q1=2, Q2=3, Q3=4), skor rata-rata responden dikelompokkan sesuai batas kuartil tersebut.

Min	Tidak Baik	Q1	Kurang Baik	Q2	Cukup Baik	Q3	Baik	Max
1	-----	2	-----	3	-----	4	-----	5

Kriteria penilaian:

- Skor Minimum - Kuartil I (2) : Tidak Baik
- Kuartil I (2) - Kuartil II (3) : Kurang Baik
- Kuartil II (3) - Kuartil III (4) : Cukup Baik
- Kuartil III (4) - Skor Maksimum (5) : Baik

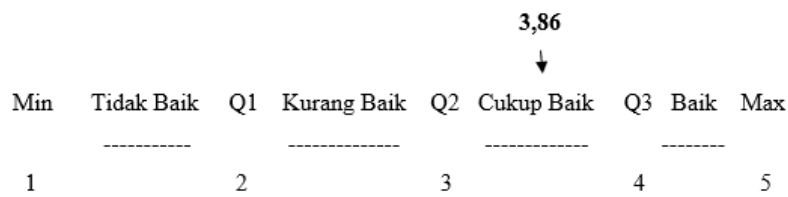
Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Atas Variabel Pengetahuan (X1)

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Total Skor	Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4	5			
1.	Latar belakang pendidikan saya sesuai, dan sangat mendukung dalam penyelesaian tugas yang diberikan.	2	0	51	116	30	199	3,69	Cukup Baik
2.	Saya memahami mengenai persediaan sesuai dengan PSAP No. 5.	1	0	48	140	10	199	3,69	Cukup Baik
3.	Saya mengetahui, apabila terjadi ketidaksesuaian terkait dengan persediaan.	1	0	21	164	25	211	3,90	Cukup Baik
4.	Saya sangat berperan dalam pekerjaan	0	0	33	140	40	213	3,94	Cukup

RESEARCH ARTICLE

terkait persediaan.									Baik
5. Saya melakukan semua perintah atasan, terutama yang berhubungan dengan persediaan.	0	0	21	140	60	221	4,09		Baik
Rata-rata								3,86	Cukup Baik

Rata-rata tanggapan X1 dengan skor tertinggi 4,09 (“Baik”) dalam pernyataan kepatuhan terhadap perintah atasan soal persediaan. Skor paling rendah 3,69 (“Cukup Baik”) ditemukan pada pemahaman latar belakang pendidikan dan PSAP No.5. Secara umum, rata-rata X1 adalah 3,86, dikategorikan “Cukup Baik”. Berikut kriteria interpretasi skornya.



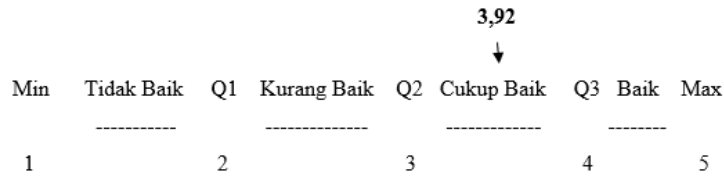
Gambar 2. Garis Kontinum Variabel Pengetahuan (X1)

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Atas Variabel Pengawasan Atasan Langsung (X2)

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Total Skor	Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4	5			
1.	Saya/atasan saya berperan penuh dalam memberikan masukan dan kebijakan terkait persediaan.	1	0	36	132	40	209	3,87	Cukup Baik
2.	Pengawasan persediaan dilakukan secara internal maupun eksternal.	0	0	21	152	45	218	4,03	Baik
3.	Pimpinan atau atasan langsung mengawasi secara aktif mekanisme pengelolaan persediaan.	0	0	45	124	40	209	3,87	Cukup Baik
4.	Pimpinan atau atasan langsung berkoordinasi dengan BPS Provinsi/BPS Pusat apabila terdapat masalah terkait persediaan.	0	0	39	124	50	213	3,94	Cukup Baik
5.	Pimpinan atau atasan langsung secara aktif mengawasi pelaporan terkait persediaan.	0	0	39	128	45	212	3,92	Cukup Baik
Rata-rata								3,92	Cukup Baik

Rata-rata tanggapan responden variabel X2 tertinggi pada “Pengawasan persediaan dilakukan secara internal maupun eksternal” dengan skor 4,03 (“Baik”). Skor paling rendah, 3,87 (“Cukup Baik”), terdapat pada pernyataan tentang peran penuh atasan dalam kebijakan persediaan dan pengawasan aktif mekanisme pengelolaan persediaan. Secara keseluruhan, rata-rata X2 adalah 3,92, dikategorikan “Cukup Baik”.

RESEARCH ARTICLE



Gambar 3. Garis Kontinum Variabel Pengawasan Atasan Langsung (X2)

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan responden Atas Variabel Penerapan PSAP No. 5 Dalam Penyajian Beban Persediaan di Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	Skor Jawaban Responden					Total Skor	Rata-rata	Kategori
		1	2	3	4	5			
1.	Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan Persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi Persediaan (perolehan dan pemakaian).	1	0	18	104	105	228	4,22	Baik
2.	Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan Persediaan, penyerahan Persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah Persediaan.	1	0	15	108	105	229	4,24	Baik
3.	Dalam rangka penyajian beban Persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian Persediaan (use of goods).	0	0	18	104	110	232	4,29	Baik
4.	Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.	0	0	15	84	140	239	4,42	Baik
5.	Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun Persediaan yang berada di unit pengguna.	2	4	24	88	100	218	4,04	Baik
6.	Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.	1	4	18	88	115	226	4,18	Baik
7.	Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLBMN maupun CaLK.	1	2	21	96	105	225	4,17	Baik
Rata-rata							4,22	Baik	

Rata-rata tanggapan variabel Penerapan PSAP No.5 (Y) tertinggi pada pernyataan pencatatan beban persediaan sesuai pemakaian barang dengan skor 4,42 (“Baik”), dan terendah pada inventarisasi fisik barang belum terpakai di gudang atau unit pengguna, skor 4,04 (“Baik”). Secara total, rata-rata respons adalah 4,22, dikategorikan “Baik”.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Nomor Item Variabel	r Hitung	r Tabel	Kriteria
Pengetahuan (X1)			
1	0,606	0,354	Valid
2	0,765	0,354	Valid
3	0,814	0,354	Valid
4	0,733	0,354	Valid
5	0,677	0,354	Valid
Pengawasan Atasan Langsung (X2)			
1	0,752	0,354	Valid
2	0,782	0,354	Valid
3	0,881	0,354	Valid
4	0,849	0,354	Valid
5	0,889	0,354	Valid
Penerapan PSAP No.5 Dalam Penyajian Beban Persediaan di Laporan Keuangan (Y)			
1	0,803	0,354	Valid
2	0,840	0,354	Valid
3	0,828	0,354	Valid
4	0,815	0,354	Valid
5	0,738	0,354	Valid
6	0,694	0,354	Valid
7	0,666	0,354	Valid

Seluruh pertanyaan variabel pengetahuan, pengawasan, dan penerapan PSAP No.5 valid karena r hitung > r tabel, sehingga instrumen ini tepat sebagai alat ukur.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Titik Kritis	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
X1 Pengetahuan	0,700	0,749	Reliabel
X2 Pengawasan	0,700	0,884	Reliabel
Y Penerapan PSAP No.5 dalam Penyajian Beban Persediaan di Laporan Keuangan	0,700	0,874	Reliabel

Nilai Cronbach's alpha semua variabel > 0,700, sesuai standar Nunnally (1994). Maka, kuesioner konsisten menghasilkan hasil yang sama bila digunakan kapan dan di mana saja.

Tabel 8. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual
		54
Normal Parameters,a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.58285429
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.095
Test Statistic		.704
Asymp. Sig. (2-tailed)		.704

Nilai Asymp Sig. 0,704 (>0,05) menunjukkan bahwa data residual tidak terstandarisasi telah terdistribusi normal.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.479	3.735		1.199	.236		
Pengetahuan	1.228	.277	.661	4.429	.000	.457	2.186
Pengawasan	.070	.242	.043	.291	.773	.457	2.186

Nilai VIF variabel bebas, yakni Pengetahuan (X1) dan Pengawasan Atasan Langsung (X2), keduanya 2,186 dan di bawah ambang kritis 10. Ini menandakan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	Unstandardized Residual	Pengawasan	Pengetahuan
			1.000	.109	.007
		Sig. (2-tailed)	.	.432	.960
		N	54	54	54
	Pengawasan	Correlation Coefficient	.109	1.000	.553**
		Sig. (2-tailed)	.432	.	.000
		N	54	54	54
	Pengetahuan	Correlation Coefficient	.007	.553**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.960	.000	.
		N	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel X1 = 0,960 dan Pengawasan Atasan Langsung (X2) = 0,432 yaitu tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Pengujian hipotesis melalui analisis regresi dengan persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Penerapan PSAP No. 5 dalam penyajian beban persediaan di LK
- a = Konstanta
- b1, b2, b3 = Koefisien regresi
- X1 = Pengetahuan
- X2 = Pengawasan atasan langsung
- ε = Error Term (kesalahan Baku) / Residu

Analisis regresi mengevaluasi dampak Pengetahuan dan Pengawasan pada Penerapan PSAP No.5 dalam Beban Persediaan. Hasilnya tercantum berikut:

Tabel 11. Nilai Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.479	3.735		1.199	.236		
Pengetahuan	1.228	.277	.661	4.429	.000	.457	2.186
Pengawasan	.070	.242	.043	.291	.773	.457	2.186

RESEARCH ARTICLE

Persamaan regresi:

$$Y = 4,479 + 1,228 X_1 + 0,070 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- 1) Konstanta a = 4,479 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan (X1) dan Pengawasan Atasan Langsung (X2) bernilai nol, maka Penerapan PSAP No.5 (Y) sebesar 4,479.
- 2) b) Koefisien b1 = 1,288 berarti setiap kenaikan 1 satuan pada Pengetahuan (X1) meningkatkan Penerapan PSAP No.5 (Y) sebesar 1,288.
- 3) Koefisien b2 = 0,070 menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan pada Pengawasan Atasan Langsung (X2) meningkatkan Penerapan PSAP No.5 (Y) 0,070.

Tabel 12. Nilai Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693a	.481	.460	3.180

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,693 tergolong kuat menurut kriteria (0,60–0,799), menandakan hubungan erat antara variabel bebas dan terikat. Analisis korelasi parsial guna melihat hubungan setiap variabel independen dengan variabel terikat secara terpisah sebagai berikut.

Tabel 13. Koefisien Korelasi Parsial

Control Variables		Correlations			
			Pengetahuan	Pengawasan	Penerapan_PSAP_No5
-none-a	Pengetahuan	Correlation	1.000	.737	.693
		Significance (2-tailed)	.	.000	.000
		Df	0	52	52
	Pengawasan	Correlation	.737	1.000	.530
		Significance (2-tailed)	.000	.	.000
		Df	52	0	52
	Penerapan_PSAP_No5	Correlation	.693	.530	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.000	.
		Df	52	52	0
Penerapan_PSAP_No5	Pengetahuan	Correlation	1.000	.604	
		Significance (2-tailed)	.	.000	
		Df	0	51	
	Pengawasan	Correlation	.604	1.000	
		Significance (2-tailed)	.000	.	
		Df	51	0	

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations.

Koefisien korelasi secara parsial diuraikan:

- a) Koefisien korelasi Pengetahuan dan Penerapan PSAP No.5 adalah 0,693.
- b) Koefisien korelasi Pengawasan Atasan Langsung dan Penerapan PSAP No.5 adalah 0,53.

Tabel 14. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693a	.481	.460	3.180

Koefisien determinasi sebesar 0,481 (48,1%) menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pengawasan Atasan Langsung bersama-sama memengaruhi Penerapan PSAP No.5 sebesar 48,1%, sementara 51,9% dengan pengaruh faktor lainnya. Koefisien determinasi dihitung menggunakan perkalian Beta dan Zero Order (korelasi parsial).

RESEARCH ARTICLE

Tabel 15. Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients		Correlation Zero Order
	Beta		
1 (Constant)			
Pengetahuan	.661		.693
Pengawasan	.043		.530

$X_1 \text{ terhadap } Y = 0,661 \times 0,693 = 0,458 = 45,8 \%$
 $X_2 \text{ terhadap } Y = 0,043 \times 0,530 = 0,022 = 2,2 \%$

Pengetahuan (X1) berkontribusi 45,8% terhadap Penerapan PSAP No.5, sementara Pengawasan Atasan Langsung (X2) hanya berkontribusi 2,2% secara parsial.

Uji F menguji pengaruh simultan pengetahuan dan pengawasan terhadap penerapan PSAP No. 5 dalam penyajian beban persediaan.

- a) $H_0: \beta(x_1y, x_2y) \leq 0 \rightarrow$ tidak ada pengaruh simultan.
- b) $H_a: \beta(x_1y, x_2y) > 0 \rightarrow$ ada pengaruh simultan.

Pada $\alpha = 0,05$, H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Tabel 16. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	477.402	2	238.701	23.602	.000b
Residual	515.801	51	10.114		
Total	993.204	53			

Nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 23,602 > 3,18$ menolak H_0 , berarti X_1 dan X_2 berpengaruh signifikan simultan terhadap Y.

Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh parsial tiap variabel independen terhadap variabel dependen

Hipotesis uji:

- a) $H_{01}: b_{yx1} = 0 \rightarrow X_1$ tidak berpengaruh parsial terhadap Y.
- b) $H_{a1}: b_{yx1} \neq 0 \rightarrow X_1$ berpengaruh parsial terhadap Y.
- c) $H_{02}: b_{yx2} = 0 \rightarrow X_2$ tidak berpengaruh parsial terhadap Y.
- d) $H_{a2}: b_{yx2} \neq 0 \rightarrow X_2$ berpengaruh parsial terhadap Y.

Dengan taraf signifikansi = 5%

Kriteria :

- a) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel} : H_0$ diterima
- b) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} : H_0$ ditolak

Hasil thitung berikut:

Tabel 17. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.479	3.735		1.199	.236		
Pengetahuan	1.228	.277	.661	4.429	.000	.457	2.186
Pengawasan	.070	.242	.043	.291	.773	.457	2.186

RESEARCH ARTICLE

Nilai t hitung X_1 adalah 4,429, sementara X_2 yaitu 0,291. Dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 50$, nilai t tabel satu arah adalah $\pm 1,67591$. Karena t hitung $X_1 > t$ tabel ($4,429 > 1,67591$), H_0 ditolak dan Pengetahuan berpengaruh parsial signifikan terhadap penerapan PSAP No.5. Sebaliknya, t hitung $X_2 < t$ tabel ($0,291 < 1,67591$), sehingga H_0 diterima dan Pengawasan tidak berpengaruh signifikan.

4.2 Pembahasan

Uji parsial menunjukkan pengetahuan berpengaruh terhadap penerapan PSAP No. 5, dibuktikan t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 , dengan kontribusi pengaruh 45,8%. Penerapan PSAP No.5 dalam laporan keuangan akan optimal jika pengelola persediaan memiliki pengetahuan yang cukup. Saat ini, pemahaman terkait pengelolaan persediaan belum maksimal, sehingga risiko kesalahan material dalam penyajian meningkat dan dapat mempengaruhi opini BPK terhadap laporan keuangan. Din et al. (2020), menemukan pencatatan persediaan sering tidak sesuai standar akibat pemahaman yang kurang. Karanja Ngugi (2014), kompetensi staf memengaruhi efektivitas manajemen persediaan (Djokopranoto et al., 2016). Kasus opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di BPS terkait pengelolaan persediaan dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan personal. Analisis deskriptif menunjukkan skor pengetahuan 3,86 (cukup baik), dengan nilai terendah 3,69 pada pernyataan terkait latar belakang pendidikan dan pemahaman PSAP No.5. Sesuai Wawan dan Dewi (2010), pengetahuan berkaitan erat dengan pendidikan formal. Karena keterbatasan rekrutmen, banyak pegawai ditempatkan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sehingga pemahaman pengelolaan persediaan kurang optimal dan perlu perbaikan agar penyajian beban persediaan dalam laporan keuangan lebih terpercaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengawasan Atasan Langsung (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAP No.5, dengan t hitung $0,291 < t$ tabel $1,67591$ dan kontribusi hanya 2,2%. Meski demikian, pengaruh positif menunjukkan pengawasan yang baik berpotensi memperbaiki penerapan PSAP No.5. Analisis deskriptif mengungkap perlunya peningkatan pengawasan, terutama dalam pemberian masukan kebijakan dan pengawasan aktif mekanisme persediaan, dengan skor terendah 3,87 ("Cukup Baik") pada dua aspek tersebut. Sejalan dengan Robbins & Mary Coulter (2005) dalam Satriadi (2015), aspek penting dalam pengawasan adalah mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan antara standar dan realisasi.

5. Kesimpulan

BPS Provinsi Jawa Barat adalah satuan kerja dengan nilai persediaan material, berisiko memengaruhi kewajaran laporan keuangan jika pengelolaan dan penyajian tidak sesuai PSAP 05. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAP No.5, sedangkan pengawasan atasan langsung tidak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan persediaan sangat diperlukan untuk mendukung penerapan PSAP 05 yang baik.

6. Referensi

- Din, M., Nasir, M., Afdalia, N., & Dharma, D. M. (2020). Peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui penatausahaan barang persediaan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 55–62.
- Djokopranoto, Indrajit, R. E., & Richardus. (2016). *Manajemen persediaan*. PT Grasindo.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

RESEARCH ARTICLE

- Kasmir. (2019). *Manajemen sumber daya manusia: Teori dan praktik* (Edisi 5). PT Raja Grafindo Persada.
- Koori, J., Nur, M. H., & Jeremiah, N. (2017). Inventory controls and financial performance of Kenol Kobil Limited in Kenya. *International Journal of Finance and Accounting*, 2(5), 34–50.
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen strategik pengetahuan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mufidah. (2017). Pengaruh pengendalian internal persediaan dan sistem informasi akuntansi terhadap upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan persediaan pada PT Mitra Jambi Pratama. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 103–119.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Nawawi, H. (1994). *Pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah*. Erlangga.
- Ngugi, E. B. G., & Karina, D. (2014). Determinants of effective inventory management at Kenol Kobil Limited. *European Journal of Business Management*, 1(11), 341–361.
- Priyastama, R. (2008). *Buku sakti kuasai SPSS*. PT Anak Hebat Indonesia.
- Rifai, R. P., & Tandirerung, J. J. (2016). Evaluasi kebijakan akuntansi dalam pengukuran persediaan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang akuntansi persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 11–19.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). *Manajemen* (Edisi 7, Jilid 2, terjemahan). PT Indeks. (Buku asli diterbitkan tahun 2002).
- Sugiyono. (2015a). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015b). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sukmawati, D., Ruliana, T., & Latif, I. N. (2017). Analisa pengelolaan persediaan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 1(2), 1–13.
- Sutomo, S. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Corbooks dan LTKER.
- Wehrich, H., Cannice, M. V., & Koontz, H. (2009). *Manajemen* (terjemahan). Erlangga. (Buku asli diterbitkan tahun 2008).
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Alfabeta.